

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD KEMANTREN GONDOKUSUMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

**Bab I
Pendahuluan**

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2024; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab II
Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN BELANJA	16.536.060.978,00	15.762.111.122,00	95,32%
Surplus (defisit)	(16.536.060.978,00)	(15.762.111.122,00)	

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024

Uraian	2023	2024	%
PENDAPATAN BELANJA	13.713.894.353,00	15.762.111.122,00	14,94%
Surplus (defisit)	(13.713.894.353,00)	(15.762.111.122,00)	

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2024 **NIHIL**

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.762.111.112,00 atau 95,32% dari target sebesar Rp16.536.060.978 naik 14,94% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.713.894.353,00

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 **NIHIL**

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL			
Pendapatan Daerah					

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2023	2024	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL		
Pendapatan Daerah				

2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 94,56%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.762.111.122,00 naik sebesar 14,94% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.713.894.353,00.

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 5,44%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp841.745.000,00 atau sebesar 5,44% dari Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp899.660.000,00 naik 5,56 % dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp797.435.329,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	15.636.400.978,00	14.920.366.122,00	95,42%	94,56%
	Belanja Pegawai	7.528.502.000,00	6.986.562.551,00	92,80%	45,53%
	Belanja Barang dan Jasa	6.179.227.522,00	6.030.355.721,00	97,59%	37,37%
	Belanja Hibah	1.928.671.456,00	1.903.447.850,00	98,69%	11,66%
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
2	Belanja Modal	899.660.000,00	841.745.000,00	93,56%	5,44%
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	899.660.000,00	841.745.000,00	93,56%	5,44%
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00%	0,00%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	0,00%	0,00%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja		16.536.060.978,00	15.762.111.122,00		100%

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2023	2024	(%)
1	Belanja Operasi			
	Belanja Pegawai	6.521.957.975,00	6.986.562.551,00	7,12%
	Belanja Barang dan Jasa	4.799.312.010,00	6.030.355.721,00	25,65%
	Belanja Hibah	1.595.189.039,00	1.903.447.850,00	83,81%
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	Belanja Modal			
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	448.467.579,00	841.745.000,00	87,69%
	Belanja Gedung dan Bangunan	278.644.000,00	-	-100,00%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.323.750,00	-	-100,00%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja		13.713.894.353,00	15.762.111.122,00	14,94%

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.03.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang				
3					
1.03.1	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang				
3.5.02.	Satuan Ruang Strategis Sumbu	100.000.000,00	98.934.400,00	98,93%	0,60%
1	Filosofis Kelurahan Demangan				
1.03.1	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang				
3.5.02.	Satuan Ruang Strategis Sumbu	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,60%
1	Filosofis Kelurahan Kotabaru				
1.03.1	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang				
3.5.02.	Satuan Ruang Strategis Sumbu	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,60%
1	Filosofis Kelurahan Klitren				
1.03.1	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang				
3.5.02.	Satuan Ruang Strategis Sumbu	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,60%
1	Filosofis Kelurahan Baciro				
1.03.1	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang				
3.5.02.	Satuan Ruang Strategis Sumbu	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,60%
1	Filosofis Kelurahan Terban				
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	Kabupaten/Kota				
1.2.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	704.000,00	704.000,00	100,00%	0,00%
1.2.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	242.000,00	242.000,00	100,00%	0,00%
1.2.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	242.000,00	242.000,00	100,00%	0,00%
1.2.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	242.000,00	242.000,00	100,00%	0,00%
1.2.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	242.000,00	242.000,00	100,00%	0,00%
1.2.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.050.000,00	10.050.000,00	100,00%	0,06%
1.2.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.000,00	220.000,00	100,00%	0,00%
1.2.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.2.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.528.502.000,00	6.986.562.551,00	92,80%	45,53%
1.2.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	660.000,00	660.000,00	100,00%	0,00%
1.2.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	396.000,00	396.000,00	100,00%	0,00%
1.2.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	440.000,00	440.000,00	100,00%	0,00%
1.2.2.6	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	220.000,00	220.000,00	100,00%	0,00%
1.2.2.7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.815.000,00	1.815.000,00	100,00%	0,01%
1.2.2.8	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	220.000,00	220.000,00	100,00%	0,00%
1.2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1.2.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	345.000,00	345.000,00	100,00%	0,00%
1.2.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	345.000,00	345.000,00	100,00%	0,00%

1.2.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	345.000,00	345.000,00	100,00%	0,00%
1.2.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	345.000,00	345.000,00	100,00%	0,00%
1.2.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	345.000,00	345.000,00	100,00%	0,00%
1.2.3.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	345.000,00	345.000,00	100,00%	0,00%
1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.2.5.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%	0,01%
1.2.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.2.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.724.000,00	5.765.000,00	85,74%	0,04%
1.2.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.893.212,00	46.583.800,00	84,86%	0,33%
1.2.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.246.000,00	11.534.000,00	75,65%	0,09%
1.2.6.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78.750.000,00	54.091.850,00	68,69%	0,48%
1.2.6.9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.000.000,00	33.973.000,00	99,92%	0,21%
1.2.8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				0,00%
1.2.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	0,02%
1.2.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.400.000,00	166.572.755,00	83,12%	1,21%
1.2.8.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.006.084.000,00	978.414.000,00	97,25%	6,08%
1.2.9	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.2.9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.080.000,00	24.193.273,00	96,46%	0,15%
1.2.9.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.180.000,00	51.818.633,00	61,56%	0,51%
1.2.9.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.160.000,00	32.119.000,00	99,87%	0,19%
1.2.9.9	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	296.839.610,00	296.311.610,00	99,82%	1,80%
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				0,00%
2.2.3	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
2.2.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	27.420.000,00	27.420.000,00	100,00%	0,17%
2.2.4	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				
2.2.4.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.820.000,00	9.820.000,00	100,00%	0,06%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
3.2.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
3.2.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	152.745.000,00	152.745.000,00	100,00%	0,92%
3.2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				

3.2.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	51.664.600,00	51.650.000,00	99,97%	0,31%
3.2.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan	902.189.000,00	893.618.000,00	99,05%	5,46%
3.2.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotabaru	468.131.800,00	465.458.800,00	99,43%	2,83%
3.2.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klitren	465.308.438,00	463.560.800,00	99,62%	2,81%
3.2.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baciro	508.349.000,00	494.841.000,00	97,34%	3,07%
3.2.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terban	607.257.018,00	550.388.050,00	90,64%	3,67%
3.2.2.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Demangan	740.653.000,00	739.453.000,00	99,84%	4,48%
3.2.2.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru	391.842.000,00	391.842.000,00	100,00%	2,37%
3.2.2.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klitren	608.779.000,00	606.796.000,00	99,67%	3,68%
3.2.2.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baciro	823.646.600,00	821.828.600,00	99,78%	4,98%
3.2.2.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terban	555.368.000,00	552.243.000,00	99,44%	3,36%
3.2.2.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	2.875.000,00	2.860.000,00	99,48%	0,02%
3.2.3	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
3.2.3.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.672.000,00	19.278.000,00	93,26%	0,13%
3.2.3.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00%	0,01%
3.2.6	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
3.2.6.3	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	31.655.000,00	31.655.000,00	100,00%	0,19%
3.2.6.9	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	9.276.500,00	9.276.500,00	100,00%	0,06%
3.2.6.10	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10.351.900,00	10.312.000,00	99,61%	0,06%
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
4.2.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00%
4.2.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	199.496.500,00	195.034.500,00	97,76%	1,21%
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
5.2.1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.364.800,00	6.820.000,00	92,60%	0,04%
5.2.1.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	55.084.000,00	55.084.000,00	100,00%	0,33%
Jumlah Belanja		16.536.060.978,00	15.762.111.122,00		

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2023	2024	(%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Kabupaten/Kota			
1.03.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang			
1.03.1	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
3.5.02.	Satuan Ruang Strategis Sumbu	-	100.000.000,00	0,00%
1	Filosofis Kelurahan Demangan			
1.03.1	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
3.5.02.	Satuan Ruang Strategis Sumbu	-	98.934.400,00	0,00%
1	Filosofis Kelurahan Kotabaru			
1.03.1	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
3.5.02.	Satuan Ruang Strategis Sumbu	-	100.000.000,00	0,00%
1	Filosofis Kelurahan Klitren			
1.03.1	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
3.5.02.	Satuan Ruang Strategis Sumbu	-	100.000.000,00	0,00%
1	Filosofis Kelurahan Baciro			
1.03.1	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
3.5.02.	Satuan Ruang Strategis Sumbu	-	100.000.000,00	0,00%
1	Filosofis Kelurahan Terban			
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			
8.5.7	Budaya			
8.5.7.6	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	-	0,00%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	Kabupaten/Kota			
1.2.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	576.000,00	704.000,00	122,22%
1.2.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	198.000,00	242.000,00	
1.2.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	198.000,00	242.000,00	
1.2.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	319.250,00	242.000,00	
1.2.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	320.500,00	242.000,00	75,51%
1.2.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.376.000,00	10.050.000,00	119,99%
1.2.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.000,00	220.000,00	
1.2.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.2.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.521.957.975,00	6.986.562.551,00	107,12%
1.2.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.080.000,00	660.000,00	61,11%
1.2.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	360.000,00	396.000,00	110,00%
1.2.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	360.000,00	440.000,00	122,22%
1.2.2.6	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	180.000,00	220.000,00	122,22%
1.2.2.7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	180.000,00	1.815.000,00	1008,33%
1.2.2.8	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	180.000,00	220.000,00	122,22%
1.2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1.2.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	520.000,00	345.000,00	

1.2.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	520.000,00	345.000,00	
1.2.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	520.000,00	345.000,00	
1.2.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	520.000,00	345.000,00	
1.2.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	520.000,00	345.000,00	
1.2.3.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	520.000,00	345.000,00	
1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1.2.5.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.525.000,00	1.150.000,00	45,54%
1.2.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.2.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.075.000,00	5.765.000,00	113,60%
1.2.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.710.400,00	46.583.800,00	151,69%
1.2.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.536.500,00	11.534.000,00	153,04%
1.2.6.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.794.750,00	54.091.850,00	98,72%
1.2.6.9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.655.000,00	33.973.000,00	137,79%
1.2.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.2.7.5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	128.971.300,00	-	0,00%
1.2.7.6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.000.000,00	-	0,00%
1.2.8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1.2.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000,00	2.500.000,00	200,00%
1.2.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.636.460,00	166.572.755,00	117,61%
1.2.8.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	813.376.800,00	978.414.000,00	120,29%
1.2.9	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.2.9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.114.380,00	24.193.273,00	120,28%
1.2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.004.548,00	51.818.633,00	90,90%
1.2.9.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.050.000,00	32.119.000,00	100,22%
1.2.9.9	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	392.144.798,00	296.311.610,00	75,56%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
2.2.3	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
2.2.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	26.700.000,00	27.420.000,00	102,70%
2.2.4	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			
2.2.4.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	25.151.750,00	9.820.000,00	

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
3.2.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
3.2.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	145.430.000,00	152.745.000,00	
3.2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
3.2.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.396.124,00	51.650.000,00	96,73%
3.2.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan	434.730.000,00	893.618.000,00	205,56%
3.2.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotabaru	320.417.000,00	465.458.800,00	145,27%
3.2.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klitren	264.130.029,00	463.560.800,00	175,50%
3.2.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baciro	553.324.000,00	494.841.000,00	89,43%
3.2.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terban	419.418.789,00	550.388.050,00	131,23%
3.2.2.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Demangan	454.051.000,00	739.453.000,00	162,86%
3.2.2.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru	300.371.000,00	391.842.000,00	130,45%
3.2.2.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klitren	542.791.000,00	606.796.000,00	111,79%
3.2.2.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baciro	714.349.000,00	821.828.600,00	115,05%
3.2.2.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terban	577.464.000,00	552.243.000,00	95,63%
3.2.2.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	3.817.500,00	2.860.000,00	74,92%
3.2.3	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
3.2.3.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	32.350.500,00	19.278.000,00	59,59%
3.2.3.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.850.000,00	1.840.000,00	23,44%
3.2.6	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
3.2.6.3	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	26.767.000,00	31.655.000,00	118,26%
3.2.6.6	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	19.600.000,00		0,00%
3.2.6.8	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.450.000,00		
3.2.6.9	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	11.050.000,00	9.276.500,00	83,95%
3.2.6.10	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	23.350.000,00	10.312.000,00	44,16%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
4.2.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

4.2.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	180.940.000,00	195.034.500,00	107,79%
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
5.2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
5.2.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8.200.000,00	6.820.000,00	83,17%
5.2.1.8	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	51.365.000,00	55.084.000,00	107,24%
Jumlah Belanja		13.713.894.353,00	15.762.111.122,00	

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Tidak ada

Bab III
Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1	Pendapatan - LRA	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Pajak Daerah	0	0
	Retribusi Daerah	0	0
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
	Lain-lain PAD yang Sah	0	0

Penjelasan :

Realisasi pendapatan per Rincian objek Pendapatan pada tahun 2024 adalah NIHL. Tidak ada realisasi pendapatan karena SKPD tidak memiliki objek pendapatan daerah.

3.2	Belanja	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	BELANJA DAERAH		
	BELANJA OPERASI		
	Belanja Pegawai		
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
	Belanja Gaji Pokok ASN	2.543.292.815,00	2.277.700.726,00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	228.136.788,00	194.535.788,00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	253.999.900,00	247.990.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.495.000,00	32.915.000,00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	126.010.800,00	115.509.900,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	45.817.003,00	29.612.517,00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.555,00	31.949,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	224.693.657,00	210.521.999,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.227.963,00	4.648.395,00
	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	15.684.065,00	13.945.354,00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.734.636.350,00	870.699.263,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	99.599.674,00	193.640.617,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN		1.024.338.328,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.673.934.981,00	1.305.868.139,00
	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Barang		
	Belanja Barang Pakai Habis	2.617.876.056,00	1.653.121.002,00
	Belanja Jasa		
	Belanja Jasa Kantor	2.800.076.065,00	2.612.168.508,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	175.501.600,00	110.486.500,00
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.500.000,00	3.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.462.000,00	54.829.000,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	295.750.000,00	239.207.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan/Jaringandan Irigasi	-	6.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.190.000,00	120.000.000,00
	Belanja Hibah		
	Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.903.447.850,00	1.595.189.039,00
	BELANJA MODAL		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Belanja Modal Alat Kantor	-	128.971.300,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi dan Pemancar		
	Belanja Modal Alat Studio	841.745.000,00	154.496.279,00
	Belanja Modal Komputer		
	Belanja Modal Komputer Unit	-	165.000.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	Belanja Modal Bangunan Gedung		
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	278.644.000,00
	Belanja Modal Jalan/Jaringandan Irigasi		
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		
	Belanja Modal Jalan	-	70.323.750,00

TOTAL	15.762.111.122,00	13.713.894.353,00
--------------	--------------------------	--------------------------

Penjelasan :

Realisasi belanja pada tahun 2024 periode Desember 2024 mayoritas mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2023. Realisasi tahun 2024 periode Desember masih sesuai dengan timeline kegiatan belanja. Adapun Rinciannya sebagai berikut: Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp350.979.918,00 atau sebesar 10,09% dari realisasi tahun 2023. Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp113.624.658,00 atau sebesar 3,24 % dari realisasi belanja 2023. Belanja Barang tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp964.755.054,00 atau sebesar 58,36% dibanding dengan realisasi belanja 2023. Belanja Jasa tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp253.922.657,00 atau sebesar 8,52% dari realisasi tahun 2023. Realisasi Belanja Pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 13,34% atau sebesar Rp46.176.000 dari tahun 2023. Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp308.528.811,00 atau sebesar 19,32% dari tahun 2023. Belanja Modal Alat Studio bertambah karena ada tambahan anggaran sebesar Rp687.248.721,00

Ada Belanja yang mengalami penurunan akibat belanja tersebut sudah tidak dianggarkan dan adanya perubahan kegiatan di tahun 2024, adapun rinciannya sebagai berikut: Belanja Perjalanan Dinas tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp33.810.000,00 atau sebesar 28,18% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2023. Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja sudah tidak dianggarkan di tahun 2024.

3.3

Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2024 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)
Beban Pajak Daerah	0	0
Beban Retribusi Daerah	0	0
Beban hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
Beban Lain-lain PAD yang Sah	0	0

Penjelasan :

Pendapatan-LO per Rincian objek Pendapatan pada tahun 2024 adalah NIHIL. Tidak ada Pendapatan-LO karena SKPD tidak memiliki objek pendapatan daerah.

3.4

Beban	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2024 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)
BEBAN DAERAH		
BEBAN OPERASI	17.626.815.813,34	12.377.854.890,52
Beban Pegawai	6.986.562.551,00	6.521.957.975,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.478.391.546,00	3.127.411.628,00
Beban Gaji Pokok ASN	2.543.292.815,00	2.277.700.726,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	228.136.788,00	194.535.788,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	253.999.900,00	247.990.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.495.000,00	32.915.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	126.010.800,00	115.509.900,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	45.817.003,00	29.612.517,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	33.555,00	31.949,00
Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	224.693.657,00	210.521.999,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.227.963,00	4.648.395,00
Beban luran Jaminan Kematian ASN	15.684.065,00	13.945.354,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.508.171.005,00	3.394.546.347,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.734.636.350,00	870.699.263,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	99.599.674,00	193.640.617,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	1.024.338.328,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.673.934.981,00	1.305.868.139,00
Beban Barang dan Jasa	9.520.219.194,00	4.806.926.660,00
Beban Barang		
Beban Barang Pakai Habis	6.107.197.095,00	1.658.658.913,00
Beban Jasa		
Beban Jasa Kantor	2.800.618.499,00	2.614.245.247,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	175.501.600,00	110.486.500,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	4.500.000,00	3.500.000,00
Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.462.000,00	54.829.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	295.750.000,00	239.207.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan/Jaringandan Irigasi	-	6.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas		

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.190.000,00	120.000.000,00
Beban Hibah	-	19.700.000,00
Beban Hibah kepada badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	-	19.700.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.120.034.068,34	1.029.270.255,52
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		
Beban Penyusutan Alat Besar		
Beban Penyusutan Alat Bantu		
Beban Penyusutan Pompa	421.428,58	421.428,58
Beban Penyusutan Alat Angkutan		
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor		
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.239.400,91	33.239.400,92
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.624.940,25	21.291.792,75
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.551.189,86	3.551.189,86
Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga		
Beban Penyusutan Alat Kantor		
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	24.998.020,00	14.509.590,00
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	107.505.875,50	25.716.776,46
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga		
Beban Penyusutan Mebel	26.273.433,20	23.938.696,60
Beban Penyusutan Alat Pendingin	6.462.976,80	13.362.976,80
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54.142.000,00	66.280.740,00
Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	-	440.000,00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		
Beban Penyusutan Alat Studio		
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	1.157.000,00	1.157.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	745.000,00	1.945.000,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi		
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	-	1.760.000,00
Beban Penyusutan Komputer		
Beban Penyusutan Komputer Unit		
Beban Penyusutan Personal Computer	58.748.250,00	53.123.250,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer		
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	4.980.000,00	4.980.000,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu		
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat		
Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	5.993.571,30	7.279.285,64
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		
Beban Penyusutan Bangunan Gedung		
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja		
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	201.756.950,54	207.278.684,50
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	68.284.800,76	68.694.800,40
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.024.080,00	2.024.080,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.589.218,48	1.589.218,48
Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	5.501.522,66	5.501.522,66
Beban Penyusutan Taman	13.693.742,52	11.680.905,59
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III	4.796.595,56	
Beban Penyusutan Monumen		

Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti		
Beban Penyusutan Tugu	1.488.207,32	1.488.207,32
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti		
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas		
Beban Penyusutan Tugu/Tanda BatasAdministrasi	1.143.865,32	1.143.865,32
Beban Penyusutan Pagar	19.366.506,38	17.679.975,13
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		
Beban Penyusutan Jalan		
Beban Penyusutan Jalan Kota	24.922.085,06	24.922.085,06
Beban Penyusutan Jalan Desa	310.317.116,20	306.800.928,70
Beban Penyusutan Jalan Khusus	98.628.304,68	98.628.304,67
Beban Penyusutan Bangunan Air		
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		
Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	499.010,00	499.010,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/AirBaku		
Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.715.094,20	1.715.094,20
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor		
Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	747.750,00	747.750,00
Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	5.057.891,88	5.220.455,50
Beban Penyusutan Jaringan Listrik		
Beban Penyusutan Jaringan Listrik		
Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	658.240,38	658.240,38

Penjelasan realisasi :

Beban pada tahun 2024 sebagian besar mengalami kenaikan daripada tahun 2023 selaras dengan kenaikan anggaran dan realisasi belanja tahun 2024. Beban Pegawai naik di tahun 2024 sebesar Rp464.604.576 atau sebesar 8,40% dari beban tahun 2023. Beban Pegawai terdiri dari: Beban Gaji dan Tunjangan ASN yang juga mengalami kenaikan sebesar Rp350.979.918 atau sebesar 11,22% dari beban tahun 2023, dan Beban Tambahan Penghasilan ASN naik sebesar Rp113.624.658 atau sebesar 3,35% dari beban tahun 2023. Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp1.856.295.040 atau sebesar 86,22% dari tahun 2023. Beban Barang dan Jasa terdiri dari : Beban Barang yang mengalami kenaikan sebesar Rp4.448.538.182 atau sebesar 268,2% dari tahun 2023, dan Beban Jasa juga mengalami kenaikan sebesar Rp252.428.352 atau sebesar 9,25% dari tahun 2023, dan Beban Pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar Rp46.176.000 atau sebesar 15,39%. Beban Penyusutan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp90.763.812,82 dibandingkan dengan realisasi beban penyusutan tahun 2023.

Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp33.810.000 atau sebesar 28,18% dibandingkan dengan realisasi Beban tahun 2023. Beban Hibah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp19.700.000 dibandingkan dengan realisasi beban tahun 2023

3.5

Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Pengeluaran		-
Persediaan		
Barang Pakai Habis	3.413.000,00	1.589.286.189,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin		
Alat Besar	26.800.800,36	35.250.800,36
Alat Angkutan	690.100.916,86	675.217.154,62
Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.400.000,00	8.400.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.352.136.503,61	1.517.563.471,07
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	91.495.913,11	76.875.544,85
Komputer	786.242.852,90	827.595.357,71
Alat Keselamatan Kerja		6.950.000,00
Rambu-rambu	75.837.641,73	96.338.300,64
Peralatan Olahraga	25.784.000,00	38.433.000,00
Gedung dan Bangunan		
Bangunan Gedung	14.077.433.503,52	14.037.433.503,52
Monumen	74.410.366,00	74.410.366,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	319.906.085,18	319.906.085,18
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
Jalan dan Jembatan	4.338.675.056,76	4.338.675.056,76
Bangunan Air	323.616.068,65	323.616.068,65
Jaringan	26.329.614,90	26.329.614,90
Aset Tetap Lainnya		
Bahan Perpustakaan	18.202.690,90	19.059.690,90
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	80.000.000,00	80.000.000,00
Akumulasi Penyusutan		
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.774.631.240,57)	(2.473.993.440,53)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.856.822.674,72)	(2.458.003.606,14)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(1.847.956.353,58)	(1.406.027.487,12)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(80.000.000,00)	(80.000.000,00)
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain		
Aset Rusak Berat/Usang	11.142.714,32	-
TOTAL	15.770.517.459,93	17.673.315.670,37

Penjelasan :

Penambahan aset dari kelompok peralatan dan mesin tahun 2024 bertambah Rp774.174.999,32 atau sebesar 23,58% dibandingkan dengan tahun 2023. Gedung dan bangunan tahun 2024 juga bertambah sebesar Rp40.000.000 atau sebesar 0,28% dari tahun 2023. Akumulasi penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp1.141.385.735,08 dari tahun 2023. Aset Lain-lain juga mengalami peningkatan sebesar Rp11.142.714,32

Terdapat penurunan aset dari kelompok aset lancar tahun 2024 dengan rincian Barang Habis Pakai berkurang sebesar Rp1.585.873.189 karena hibah yang telah disalurkan ke masyarakat

3.6	Kewajiban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Kewajiban Jangka Pendek		
	Utang Belanja Barang dan Jasa		
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	286.069	310.757
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	249.000	195.650
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	13.255.135	12.741.363
	TOTAL	13.790.204	13.247.770

Penjelasan :

Utang Belanja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp542.434 yang terdiri dari Tagihan Telepon yang turun sebesar Rp24.688 atau sebesar 3,12% dari tahun 2023; Tagihan Listrik naik sebesar Rp513.772 atau sebesar 4,17% dari tahun 2023. Tagihan air naik sebesar Rp53.350 atau sebesar 4,03% dari tahun 2023.

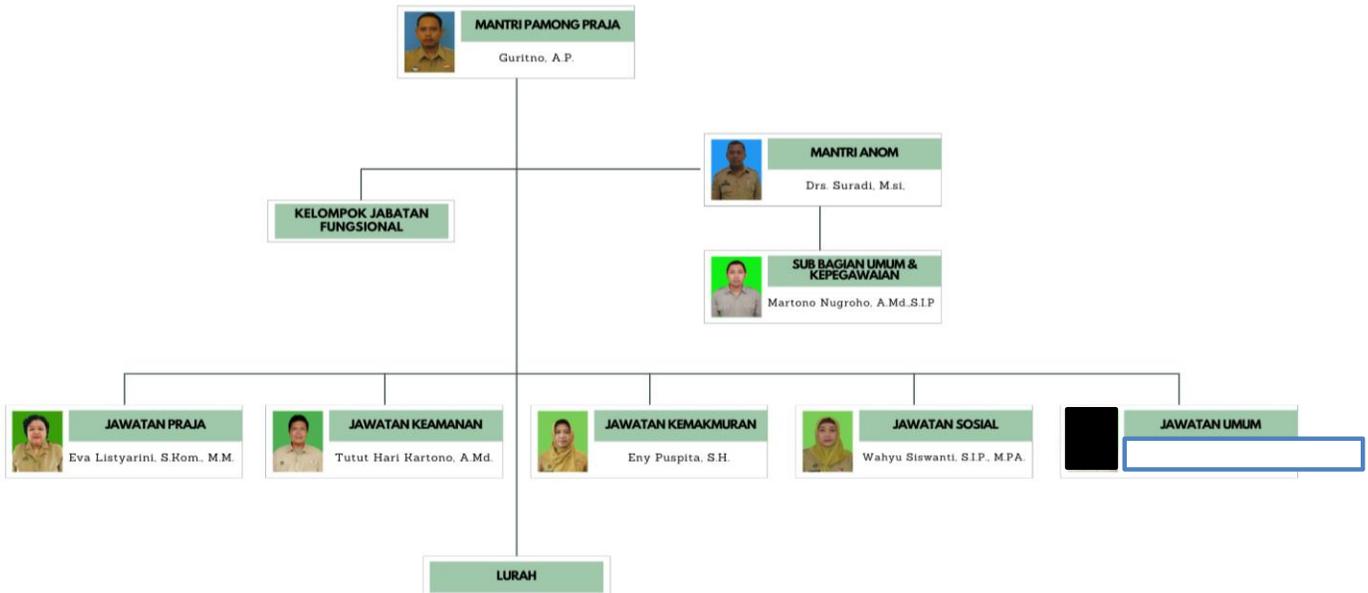
3.7	Ekuitas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Ekuitas awal	17.660.067.900,37	16.526.616.010,32
	RK PPKD	15.762.111.122,00	13.713.894.353,00
	Surplus/Defisit-LO	(17.626.815.813,34)	(12.377.854.890,52)
	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	(17.284.286,36)	(9.525.517,00)
	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(21.351.666,74)	(184.348.498,61)
	Ekuitas Aset Lainnya		(8.713.556,82)
	Ekuitas Akhir	15.756.727.255,93	17.660.067.900,37

Penjelasan :

Ekuitas selama tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp1.903.340.644,44 atau sebesar 10,78% dari tahun 2023. Penurunan terjadi di surplus/defisit-LO sebesar Rp5.248.960.922,82. Penambahan tersebut berasal dari RK PPKD sebesar Rp2.048.216.769. Ekuitas Mutasi Aset Tetap sebesar Rp17.284.286,36 dan Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp162.996.831,84.

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi



4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Kemantren

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren

Fungsi Kemantren:

- pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
- pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
- penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
- penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
- penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
- penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
- penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
- pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
- pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Bab V **Penutup**

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

a

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0% dari target Rp 0,- yang terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah sebesar Rp 0 atau 0% dari target;
- 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 0,- atau 0% dari target;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 0 atau 0% dari target;
- 4) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 0,- atau 0% dari target.

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.762.111.122,00 atau 95,32% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.1 Belanja Operasi

a.

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp14.920.366.122,00 atau sebesar 95,42% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp7.528.502.000,00 terealisasi sebesar Rp6.986.562.551 atau 92,80 % dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp6.179.227.522 terealisasi sebesar Rp6.030.355.721,00 atau sebesar 97,59% dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp1.928.671.456,00 terealisasi Rp1.903.447.850,00 atau 98,69% dari anggaran.

5.1.2.2 Belanja Modal

b.

Belanja Modal dianggarkan Rp899.660.000 terealisasi sebesar Rp841.745.000 atau 93,56% dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Lainnya.

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp15.770.517.459,93 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp3.413.000, Aset Tetap sebesar Rp15.755.961.745,61 dan Aset Lainnya sebesar Rp11.142.714,32.

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp13.830.204 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang berupa utang belanja jasa kantor (tagihan Telepon, Air dan Listrik).

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp15.756.687.255,93

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp 0 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 0.

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO tahun 2024 sebesar Rp17.626.815.813,34 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp17.626.815.813,34 dan Beban Transfer-LO sebesar Rp0.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar (Rp17.626.815.813,34)

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal 2024 sebesar Rp17.660.067.900,37 merupakan ekuitas akhir tahun 2023

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2024 sebesar (Rp17.626.815.813,34) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2024.

5.4.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar (Rp38.635.953,10) terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset Tetap sebesar (Rp17.284.286,36) dan Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan (Rp21.351.666,74).

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp15.756.727.255,93 merupakan ekuitas akhir Desember tahun 2024.

Mantri Pamong Praja

GURITNO, A.P.,M.I.P.
NIP. 197507101995011002